



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 314-327

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Arahan Mitigasi Bencana Tsunami Di Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat

Anggun Mutia Qatrunada<sup>1✉</sup>, Yudha Rahman<sup>2</sup>, Adnin Musadri Asbi<sup>3</sup>

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur  
Dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera

Email: [Anggunqatrunada@gmail.com](mailto:Anggunqatrunada@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia secara internasional dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia disebabkan sekitar 71% atau dua pertiga wilayahnya adalah berupa lautan. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang kaya akan potensi baik dari sisi ekonomi, wisata, sumber daya, namun juga berpotensi besar terhadap ancaman bencana. Pada kawasan wisata yang berada didaerah pesisir terdapat ancaman bencana tsunami yang memberikan dampak dan kerugian pada wilayah terancam bencana tsunami. Potensi utama Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pariwisata sehingga banyak wisatawan yang berkunjung untuk berlibur dan menikmati keindahan alamnya, seperti di Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki objek wisata unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pantai Tanjung Setia. Mengingat objek wisata Pantai Tanjung Setia berada di kawasan pesisir Kabupaten Pesisir Barat sehingga sangat rentan terhadap bencana pesisir yaitu bencana tsunami, maka kerugian yang terjadi akibat bencana tsunami akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dari masyarakat lokal dan perekonomian daerah apabila masyarakat dan daerah tersebut sangat bergantung pada pariwisata. Oleh sebab itu, upaya mitigasi bencana tsunami sangat diperlukan di kawasan pariwisata khususnya pada objek wisata Pantai Tanjung Setia, maka butuh dilakukan penelitian terkait arahan mitigasi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat sebagai upaya untuk menciptakan kawasan pariwisata pesisir yang tanggap bencana. Berdasarkan analisis, didapatkan arahan mitigasi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari mitigasi struktural berupa pembuatan peta dan jalur evakuasi serta pengadaan *signage* menuju tempat evakuasi dan titik kumpul, penyediaan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami, pengadaan *shelter* sebagai tempat berkumpul saat terjadinya bencana tsunami, penyediaan pemecah ombak (*break water*) untuk menahan gelombang tsunami. Sedangkan mitigasi non-struktural yaitu peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan pengelola kawasan wisata terhadap bencana tsunami, pembuatan kebijakan tentang

tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana, pembentukan forum pengurangan risiko bencana dalam peningkatan kapasitas masyarakat, pembuatan zonasi kawasan *mangrove* dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau (*green belt*).

Kata Kunci : *Mitigasi Bencana, Tsunami, Objek Wisata, Pantai Tanjung Setia*

#### Abstract

Indonesia is known as the largest archipelagic country in the world because 71% or two-third of the entire earth consist of oceans. The coastal area is an area that has the potential of a huge profit either in economic, tourism, resources, but also has great potential for disaster threats. Tourist destinations nearby the coastal area has the ongoing of tsunami threat which might impact and loss the surroundings. The good potential of Pesisir Barat Regency is caused by the existence of tourism industry that many tourists visit for a vacation and enjoy its exotic natural beauty, such as in Tanjung Setia Village, which has a leading tourist attraction in Pesisir Barat Regency. Considering that the Tanjung Setia Beach is very vulnerable to coastal disasters, and it affects the livelihoods and sustainability of the coastal communities in the regional economy. Therefore, natural disaster mitigation efforts are necessary to reduce the lives lost through tourism areas. Thus, this research is conducted to investigate natural disaster mitigation at Tanjung Setia Beach, Pesisir Barat Regency as an effort to create disaster-responsive coastal tourism areas. Based on the analysis, it was found that the natural disaster mitigation at the Tanjung Setia Beach tourist, consisted of structural mitigation by establishing maps and evacuation routes as well as providing signage to evacuation points and gathering points, providing an early warning system for the presence of a tsunami hazard, providing shelter as a gathering place, providing break water to withstand tsunami waves. While the non-structural mitigation, it required the increase of capacity and preparedness of the community and tourism area managers against the natural disaster, making policies on disaster-safe coastal land use, establishing forum on disaster risk reduction, zoning mangrove areas and coastal forests which include into the green belt.

Keyword: *Disaster Mitigation, Tsunami, Tourism, Tanjung Setia Beach*

#### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara bahwa Indonesia merupakan negara dengan komponen wilayah nasional yang terdiri dari perairan (lautan), daratan dan ruang udara termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Indonesia secara internasional dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia disebabkan sekitar 71% atau dua pertiga wilayahnya adalah berupa lautan, dengan jumlah pulau yang dimiliki yaitu sebanyak 17.504 pulau dan sebagai negara kedua setelah Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sepanjang 95.181 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2019). Berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2007 merupakan undang-undang mengenai Pengelolaan Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil, menjelaskan bahwa kawasan pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut dan dihitung ke daerah darat yaitu dari garis pantai sampai batas administrasi, dan ke arah laut dihitung dari garis pantai sepanjang 12 mil ke arah laut.

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang kaya akan potensi baik dari sisi ekonomi, wisata, sumber daya, namun juga berpotensi besar terhadap ancaman bencana (Jasmani, 2017). Sehingga Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pada kawasan pesisirnya banyak dimanfaatkan untuk kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan dan lain sebagainya yang dapat mendukung kehidupan manusia. Marfai dkk. (2014) pun mengungkapkan bahwa wilayah pesisir Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terkena bencana. Bencana alam pada kawasan wisata pesisir tidak hanya menimbulkan kerugian tetapi juga korban jiwa yang besarnya tergantung dari karakteristik ancaman, kerentanan bencana serta kapasitas bencana pada suatu kawasan wisata (Rosyidie, 2004). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dan kegiatan yang mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi banyak pada negara ataupun (Rosyidie, 2004).

Negara Indonesia yang didominasi perairan (lautan) tentunya banyak sektor pariwisata pada kawasan pesisir Indonesia, pada kawasan wisata yang berada didaerah pesisir terdapat ancaman bencana alam khususnya bencana tsunami yang mendorong timbulnya gelombang laut yang dapat memberikan dampak dan kerugian pada wilayah yang terancam bencana tsunami. Menurut Dokumen Risiko Bencana Indonesia, tsunami adalah salah satu ancaman bencana untuk wilayah pesisir di Indonesia yang dipicu oleh pergerakan secara vertikasi didasar laut. Perlunya kawasan wisata pesisir didukung dengan pengembangan dengan penerapan mitigasi bencana baik secara fisik dan non-fisik, karena pada dasarnya sejak tahap perencanaan suatu kawasan upaya mitigasi bencana harus sudah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dimana dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya. Sehingga pada objek wisata upaya mitigasi bencana dinilai sangat penting dan termasuk sarana yang sangat dibutuhkan wisatawan.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berbasiskan sektor pariwisata, yaitu wisata pesisir berupa pantai. Salah satu objek wisata yang merupakan wisata unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pantai Tanjung Setia yang berada di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan. Pantai Tanjung Setia terkenal akan

potensi pemandangan alam berupa pesisir pantai dan keindahan ombak laut yang dimiliki menjadikannya sebagai salah satu *spot surfing* yang sangat berpotensi sebagai tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Tetapi tercatat dalam RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 bahwa kawasan pesisir di Kabupaten Pesisir Barat menjadi wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami. Menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 pada Kabupaten Pesisir Barat memiliki nilai indeks risiko bencana tsunami sebesar 0,616 dan berada pada kelas risiko bencana tsunami tinggi dengan ketinggian genangan air mencapai lebih dari tiga meter. Kemudian didapatkan hasil dan temuan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ni Nyoman Putriana Piesesa (2021) bahwa pada objek wisata Pantai Tanjung Setia untuk sarana rambu-rambu mitigasi bencana belum sesuai dengan standar, baik secara kuantitas maupun kualitas karena belum terdapatnya sarana rambu-rambu mitigasi bencana. Objek wisata Pantai Tanjung Setia masih terus dikembangkan sehingga kedepannya diharapkan dapat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal khususnya untuk masyarakat Desa Tanjung Setia serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya potensi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia, sehingga upaya mitigasi bencana tsunami sangat diperlukan pada objek wisata tersebut karena kerugian yang terjadi akibat bencana tsunami akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dari masyarakat lokal dan perekonomian daerah apabila masyarakat dan daerah tersebut sangat bergantung pada pariwisata.

## METODE PENELITIAN

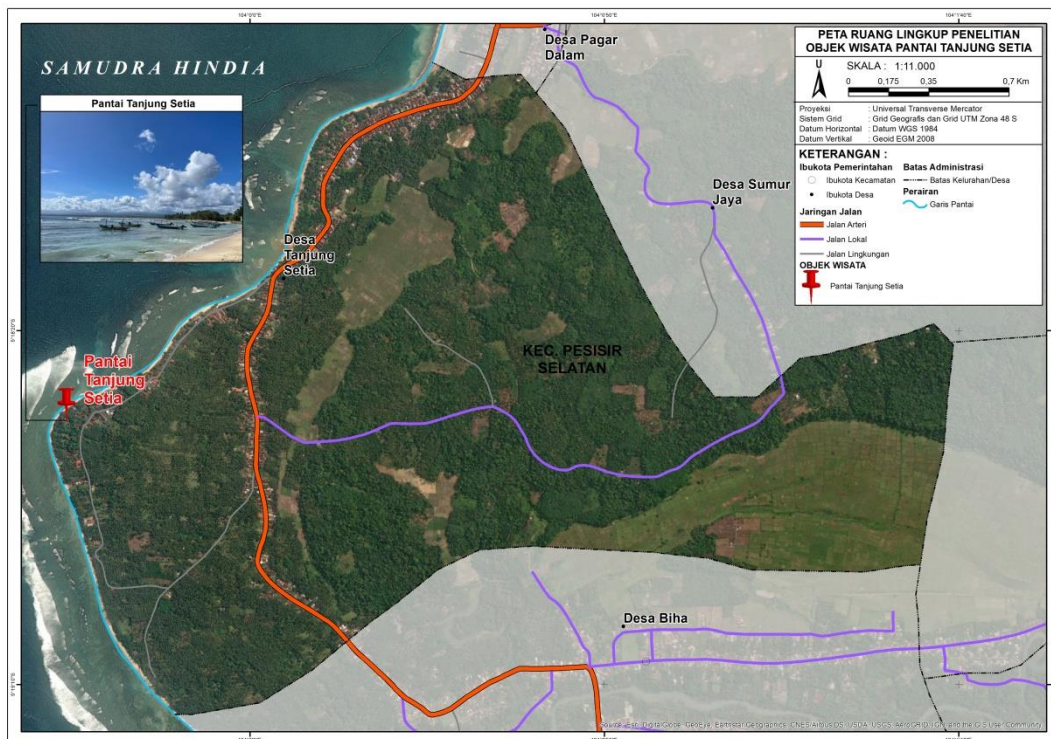
Objek wisata Pantai Tanjung Setia berlokasi di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pantai Tanjung Setia secara fisik masih sangat terjaga, karena belum banyak campur tangan manusia. Selain itu, Pantai Tanjung Setia terkenal dengan gelombang atau ombaknya yang cocok untuk berselancar, hal ini dikarenakan Pantai Tanjung Setia merupakan laut lepas yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan kelebihan tersebut menjadikan motivasi bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk mendatanginya. Adapun jumlah fasilitas pariwisata yang ada di Pantai Tanjung Setia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Fasilitas Pariwisata di Desa Tanjung Setia

Pekon/Desa	Hotel	Penginapan Lainnya	Restoran/ Rumah makan	Objek Wisata
Tanjung Setia	0	24	1	1

Sumber: Kecamatan Pesisir Selatan dalam Angka, 2019

Pada dokumen Kecamatan Pesisir Selatan dalam Angka 2019, disebutkan bahwa Desa Tanjung Setia memiliki fasilitas wisata berupa penginapan sebanyak 24 penginapan, 1 rumah makan dan 1 obyek wisata. Obyek wisata yang terdapat di Desa Tanjung Setia yaitu objek wisata Pantai Tanjung Setia yang dikelola oleh masyarakat Desa Tanjung Setia. Pantai Tanjung Setia memiliki daya tarik sebagai wisata alam yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Berikut merupakan peta objek wisata Pantai Tanjung Setia.



Gambar 1. Peta Objek Wisata Pantai Tanjung Setia

Sumber: Hasil Pengolahan Arcgis, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Arahan Mitigasi Bencana Tsunami pada Objek Wisata Pantai Tanjung Setia

Berdasarkan hasil analisis SWOT, selanjutnya akan ditentukan arahan prioritas mitigasi bencana tsunami di Pantai Tanjung Setia. Penentuan arahan prioritas mitigasi bencana tsunami berdasarkan tingkat kerentanan yang telah dilakukan pada sasaran 2, yaitu analisis tingkat kerentanan bencana tsunami di Desa Tanjung Setia untuk mengetahui dampak dan kerugian akibat bencana tsunami. Dari analisis yang telah dilakukan dihasilkan bahwa kerentanan sosial dan kerentanan fisik berada pada kelas indeks tinggi, maka arahan mitigasi bencana tsunami diprioritaskan yang berhubungan dengan penyelamatan fisik dan sosial baik mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural dengan tujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan jika terjadinya bencana tsunami. Berikut merupakan arahan prioritas mitigasi tsunami di Pantai Tanjung Setia berdasarkan hasil dari analisis SWOT yang diurutkan dari arahan prioritas terlebih dahulu.

Tabel 2. Arahan Mitigasi Struktural dan Non Struktural Bencana Tsunami di Pantai Tanjung Setia

No	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-Struktural
1	Pembuatan peta dan jalur evakuasi serta pengadaan <i>signage</i> menuju tempat evakuasi dan titik kumpul.	Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan pengelola kawasan wisata terhadap bencana tsunami.
2	Penyediaan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami.	Pembuatan kebijakan tentang tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana.
3	Pengadaan <i>shelter</i> sebagai tempat berkumpul saat terjadinya bencana tsunami.	Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam peningkatan kapasitas masyarakat.
4	Penyediaan pemecah ombak (break water) untuk menahan gelombang tsunami.	Pembuatan zonasi kawasan <i>mangrove</i> dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau ( <i>green belt</i> ).

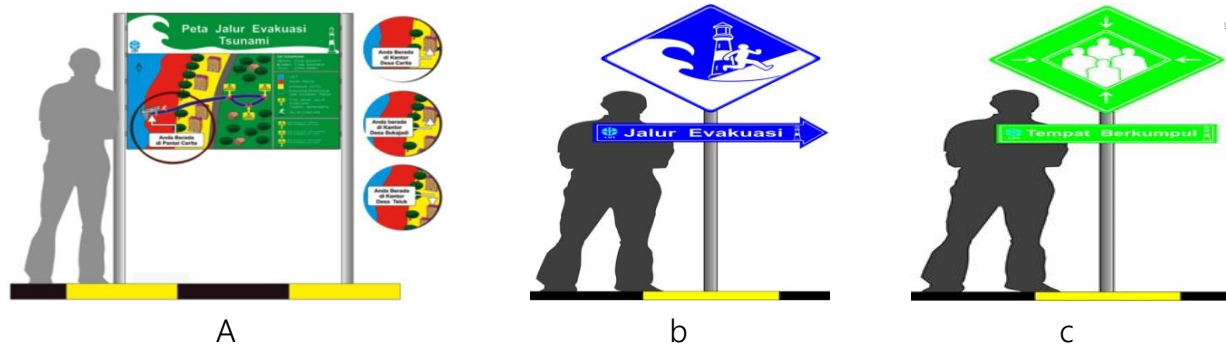
*Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2022*

#### Mitigasi Struktural

##### 1. Pembuatan Peta dan Jalur Evakuasi serta Pengadaan *Signage* Menuju Tempat Evakuasi dan Titik Kumpul

Pembuatan jalur evakuasi sebagai arahan mitigasi bencana tsunami dikarenakan belum terdapat sarana mitigasi bencana pada Pantai Tanjung Setia dan tingkat kerentanan

sosial yang tinggi pada Desa Tanjung Setia. Pembuatan jalur evakuasi diarahkan menjauhi kawasan yang berpotensi bencana tsunami dengan melalui jalan terdekat serta memiliki aksesibilitas yang baik. Sedangkan titik kumpul berada pada kawasan yang aman dari bencana tsunami seperti pada *shelter* tsunami. Jalur evakuasi dan titik kumpul didukung dengan pembangunan *signage* seperti pada contoh Gambar 2. Selain itu, jalur evakuasi dan titik kumpul juga perlu didukung melalui sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan pengelola lokasi wisata pesisir serta perlu juga dilakukan simulasi yang diadakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir terhadap ancaman dari bencana tsunami.



Gambar 2. a) Sumber Informasi Peta Jalur Evakuasi, b) *Signage* Jalur Evakuasi, c) *Signage* Titik Kumpul

*Sumber: Rezaldi, 2013*

## 2. Penyediaan Sistem Peringatan Dini adanya Bahaya Tsunami

Penyediaan sistem peringatan dini sebagai arahan mitigasi bencana tsunami dikarenakan belum terdapat sarana mitigasi bencana pada Pantai Tanjung Setia dan tingkat kerentanan sosial yang tinggi pada Desa Tanjung Setia. Penyediaan sistem peringatan dini berupa pembuatan tower pengeras suara di Pantai Tanjung Setia seperti sistem peringatan dini tsunami di Bali pada Gambar 4.13. Selain itu, sistem peringatan dini perlu didukung melalui sosialisasi dan simulasi yang diadakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada wisatawan dan masyarakat Desa Tanjung Setia serta Pokdarwis Setia Wisata terhadap ancaman dari bencana tsunami.



Gambar 3. Sistem Peringatan Dini Tsunami di Bali

## 3. Pengadaan *Shelter* Sebagai Tempat Berkumpul Saat Terjadinya Bencana Tsunami

Pengadaan *shelter* dilakukan sebagai arahan mitigasi bencana tsunami pada objek Pantai Tanjung Setia dikarenakan belum terdapat sarana mitigasi bencana dan tingkat kerentanan sosial yang tinggi pada Desa Tanjung Setia, dimana *shelter* menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan wisatawan pada saat terjadinya bencana tsunami. Pengadaan *shelter* dapat dilakukan dengan menjadikan tempat penginapan atau hotel pada di Pantai Tanjung Setia menjadi *shelter* yang sebelumnya terlebih dahulu harus di analisis kelayakan untuk menjadi *shelter*. Bangunan *shelter* dibuat bertingkat dengan bahan beton/besi agar tahan terhadap gempa bumi sebelum terjadinya bencana tsunami, agar *shelter* tersebut tidak terbengkalai, pada hari-hari biasa *shelter* dapat dimanfaatkan sebagai tempat sekolah, pertemuan, tempat rekreasi dan lain-lain. Berikut merupakan contoh shelter yang ada di Indonesia yaitu Banda Aceh.



Gambar 4. Shelter Evakuasi Tsunami Banda Aceh

#### 4. Penyediaan Pemecah Ombak (*Break Water*) Untuk Menahan Gelombang Tsunami

Penyediaan pemecah ombak (*break water*) dilakukan sebagai arahan mitigasi bencana tsunami pada objek Pantai Tanjung Setia dikarenakan belum terdapat sarana mitigasi bencana dan tingkat kerentanan fisik yang tinggi pada Desa Tanjung Setia, dimana pemecah ombak atau gelombang ini adalah prasarana yang dibangun untuk memberikan perlindungan dari serangan ombak atau gelombang, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Perlindungan yang dilakukan oleh pemecah gelombang akan menahan dan mengurangi laju dari serangan gelombang tsunami sehingga energi gelombang berkurang. Dalam penyediaan pemecah gelombang diperlukan analisis lebih lanjut terhadap bahan bangunan yang dipakai. Berikut merupakan contoh pemecah gelombang tsunami di Pantai Glagah, Kulon Progo.



Gambar 5. Pemecah Gelombang di Pantai Glagah, Kulon Progo

#### Mitigasi Non-Struktural

a. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pengelola Kawasan Wisata Terhadap Bencana

Adapun arahan mitigasi non-struktural di Desa Tanjung Setia yaitu peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan pengelola objek wisata Pantai Tanjung Setia untuk mendukung kegiatan mitigasi struktural sehingga memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam menanggulangi ancaman bencana tsunami. Dimana peningkatan tersebut berisikan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan penyadaran terhadap para pemangku kepentingan terkait dengan bencana pesisir, mulai dari gejala atau ciri-ciri bencana, dampak dari bencana, tata cara evakuasi atau menyelamatkan diri.

b. Pembuatan Kebijakan Tata Guna Lahan Kawasan Pesisir yang Aman Bencana

Pembuatan kebijakan tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana, hal ini perlu dilakukan karena belum terdapat sarana mitigasi bencana pada Pantai Tanjung Setia dan tingkat kerentanan fisik yang tinggi pada Desa Tanjung Setia. Sehingga diperlukannya mitigasi bencana yang berhubungan dengan penyelamatan fisik. Pembuatan kebijakan tata guna lahan kawasan pesisir dapat dibuat berdasarkan ancaman bencana tsunami dengan pembagian kawasan, yaitu kawasan *aquatic* (konservasi pesisir pantai), kawasan terbangun terbatas (kawasan pertanian atau permukiman penduduk dengan kepadatan rendah), kawasan terbangun aman bencana tsunami (kawasan aman terhadap ancaman bencana tsunami) dan *buffer zone* (arahan perlindungan di area sempadan pantai maupun sungai berupa *green belt*). Pembuatan kebijakan tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana perlu dilakukan sebab masih banyak masyarakat yang membangun permukiman di daerah kawasan rawan bencana tsunami dan bertujuan agar dapat menata permukiman penduduk di kawasan rawan bencana tersebut ditempat yang aman.

c. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mempunyai pengaruh besar dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan wilayah terhadap suatu bencana dalam hal ini bencana pada kawasan pesisir. Forum PRB dapat terdiri dari wakil-wakil masyarakat, pihak pemerintah desa dan kecamatan, relawan siaga bencana serta pihak ketiga (LSM/NGO) yang terintegrasi dengan pihak BPBD dan dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan kegiatan PRB. Forum ini berfungsi dalam merencanakan dan melaksanakan praktek pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana. Adapun pembentukan Forum PRB tingkat desa juga diperlukan agar kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural di Desa Tanjung Setia dapat dilakukan secara terstruktur dan terencana melalui koordinasi antar lembaga.

d. Pembuatan Zonasi Kawasan *Mangrove* dan Hutan Pantai yang Termasuk Kedalam Jalur Hijau (*Green Belt*)

Pembuatan aturan zonasi dalam hal ini yaitu zonasi risiko bencana pesisir serta zonasi kawasan *mangrove* dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau (*green belt*). Adapun aturan tersebut dapat dimasukkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat atau Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sehingga penataan ruang pada wilayah ancaman bencana tsunami dapat diatur sesuai dengan upaya mitigasinya serta kawasan zonasi *green belt* yaitu kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai sehingga kawasan tersebut dapat dilindungi untuk menahan gelombang tsunami.

## SIMPULAN

Dalam perumusan arahan mitigasi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia yang berada di Desa Tanjung Setia menggunakan analisis SWOT dengan melihat faktor internal, yaitu berasal dari dalam wilayah penelitian berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari ruang lingkup penelitian. Sedangkan pada faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh eksternal wilayah pada dokumen atau kebijakan yang memiliki hubungan dan pengaruh pada ruang lingkup wilayah penelitian. Didapatkan arahan mitigasi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia terdiri dari mitigasi struktural berupa: Pembuatan peta dan jalur evakuasi serta pengadaan signage menuju tempat evakuasi dan titik kumpul. Penyediaan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami. Pengadaan shelter sebagai tempat berkumpul saat terjadinya bencana tsunami. Penyediaan pemecah ombak (*break water*) untuk menahan gelombang tsunami.

Sedangkan mitigasi non-struktural, yaitu peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan pengelola kawasan wisata terhadap bencana tsunami. Pembuatan kebijakan tentang tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana. Pembentukan

Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Pembuatan zonasi kawasan mangrove dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau (*green belt*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfianor, R., Safitri, N. A., & Hidayati, A. (2020). *Identifikasi Peran Kelembagaan Dalam Kegiatan Pariwisata Kabupaten Tabalong*. Balikpapan: Institut Teknologi Kalimantan.
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Mitigasi.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2015). *Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Budjang, A. F. (2021). *Kajian Risiko dan Mitigasi Bencana Pada Kawasan Wisata Pesisir Kabupaten Takalar (Studi Kasus: Kecamatan Mangarabombang)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Data Jumlah Penduduk Per Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021*. (2021). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat.
- Diposaptono, S. (2003). *Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir Dalam Kerangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*. Jurnal Alami.
- Diposaptono, S. (2011). *Sebuah Kumpulan Pemikiran Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Ghani, Y. A. (2017). *Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat*. Jakarta Selatan: Universitas Bina Sarana Informatika.
- Hikmawaty, U., Triutomo, S., & Ali, M. (2018). *Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pantai Labombo Kota Palopo Berbasis Wisata*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Isdarmanto, O. S. (2018). *Analisis Potensi Pantai Glagah Sebagai Ekowisata Unggulan di Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM) Yogyakarta.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara.
- Jasmani. (2017). *Kajian Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai di Wilayah Pesisir Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintaereng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

- Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024*. (2019). Bandar Lampung: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2019). *Laut Masa Depan Bangsa Mari Jaga Bersama*. Halaman website: <https://kkp.go.id/>: (Terakhir diakses pada 5 Januari 2022).
- Laporan Fakta dan Analisis Studio Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019*. (2019). Perencanaan Wilayah dan Kota, Intitut Teknologi Sumatera.
- Marfai, M. A., Cahyadi, A., & Kasbullah, A. A. (2014). *Dampak Bencana Banjir Pesisir dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya di Kabupaten Pekalongan*. Yogyakarta: Makalah dalam Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia (PIT IGI).
- Maulana, E., Wulan, T. R., & Wahyuningsih, D. S. (2016). *Strategi Pengurangan Risiko Abrasi di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah*. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016 Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim*. Hal. 389-398.
- Nastiti, C. E., & Umilia, E. (2013). *Faktor Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Jember*. 2(2), C164-C167: Jurnal Teknik ITS.
- Nawawi, A. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2037*. (2018). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037*. (2017). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*. (2008). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. (2012). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. (2012). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. (2008). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*. (2011). Pemerintah Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.* (2010). Pemerintah Republik Indonesia.
- Piesesa, N. P. (2021). *Kepuasan Wisatawan Terhadap Sarana dan Prasarana Wisata Di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat.* Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera.
- Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.* (2021). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat.
- Pujaastawa, I., & Ariana, I. N. (2015). *Pedoman Identifikasi Potensi Daya Tarik Wisata.* Denpasar: Universitas Udayana.
- Purwanto, N. I., Poluan, R., & Takumansang, E. D. (2017). *Perencanaan Wilayah Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.* 1-8.
- Putri, T. D., Sunarsih, & Muhammad, F. (2019). *Analisis Kerentanan Sosial Masyarakat dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kampung Gemblakan Atas, Kota Yogyakarta.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rangkuti, F. (2011). *SWOT Balanced Scorecard.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rezaldi, M. Y. (2015). *Diseminasi Ancaman Tsunami Melalui Sign System untuk Kawasan Pantai Carita.* Bandung: Iptek-Kom.
- Rif'an, A. A., Irawati, N., & Tyawati, A. W. (2018). *Manajemen Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata yang Berada Pada Zona Rawan Bencana (Kasus Banjir Rob dan Abrasi di Pantai Sayung, Demak).* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM).
- Rizkiyani, A. H., & Suprihardjo, R. (2013). *Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Talang.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- Rosydie, A. (2004). *Aspek Kebencanaan Pada Kawasan Wisata.* Bandung: Journal of Regional and City Planning, 15(2), 48-64.
- Sipta, Y. (2017). *Shelter Mitigasi Bencana, Syiah Kuala.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sriharini. (2010). *Membangun Masyarakat Sadar Bencana.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Standar Nasional Indonesia 7645 tentang Klasifikasi Penutup Lahan.* (2010). Badan Standar Nasional Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata.* Yogyakarta: Andi.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. N. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata.* Denpasar: Pustaka Larasan.

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.* (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.* (2007). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.* (2007). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.* (2008). Pemerintah Republik Indonesia.
- UNESCO-IOC. (2006). *Rangkuman Istilah Tsunami.* Informasi Dokumen IOC No. 1221. Paris: UNESCO.
- Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) Edisi Revisi.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wardana, S. (2020). *Pariwisata Tangguh Bencana di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Kalianda.* Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera.
- Wibisono, W. (2020). *Strategi Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung dari Bahaya Banjir Rob (Studi Kasus: Kelurahan Kangkung, Kelurahan Bumi Waras, dan Kelurahan Sukaraja).* Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera.